



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Asih Liza Restanti Apt., M.Kes.

Jabatan : Direktur Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Dra. Asih Liza Restanti Apt., M.Kes.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU
USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN
KOSMETIK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	82
2	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos	50
3	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	84
4	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos	Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	76
5	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos	Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	50

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standar	95
7	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos	Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	94,19
8	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4,01
9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	81
10	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	80
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2,1
12	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
13	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan masyarakat	60
14	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha	60
15	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kosmetik yang sesuai standar	95
16	Meningkatnya pemberdayaan Pemda dan masyarakat dalam program keamanan OT,SK, dan Kos	Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	

Kegiatan :

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK,
Kos

Anggaran :

Rp.
12,243,572,000.00

Jakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



Dra. Asih Liza Restanti Apt., M.Kes.